



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Rejang Lebong, 10 Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 2 (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), No Handphone 082121774XXX, bertempat tinggal di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Ketenong, 03 September 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Gang Pensiunan No 20, Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 508/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXX, tertanggal 31 Agustus 2023, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ;

- Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22-02-2013, Pendidikan SD;
- Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 17-04-2015, Pendidikan SD;

Dan sekarang anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat Sering berkata kasar yang menakiti hati Penggugat, menyakiti fisik bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak aman dan nyaman lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

4.2. Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4.3. Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai PNS,

4.4. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dimana Tergugat pernah membeli sebuah mobil secara kredit yang menggunakan nama Penggugat, setelah itu dijual kepada temannya dan dilarikan ke Pulau Jawa, sehingga pihak leasing mobil tersebut menagih kepada Penggugat, Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya marah seakan tidak mau tahu dan menganggap masalah tersebut sudah selesai, tapi pada kenyataannya, mobil tersebut sudah ditarik oleh leasing dan dilelang namun harga jual mobil tersebut tidak bisa menutupi setoran pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing, sehingga nama Penggugat terkena blacklis dari OJK dan Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke Bank;

4.5. Tergugat yang tidak perhatian dengan Penggugat dan anak;

5. Bahwa sekira pada Pertengahan Tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Gang Pensiunan No 20, Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 5 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, berikut Penggugat lampirkan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkuu Utara nomor: 873.4/1434/BKPSDM?2022, tentang pemberian izin perceraian atas nama Mariza Januleti, M.Pd. ditetapkan di Arga Makmur tertanggal 9 September 2022;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, kemudian diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan Penggugat melampirkan surat izin melakukan perceraian dari atasan dan Penggugat telah menyerahkan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan Nomor 873.4/1434/BKPSDM/2022, tertanggal 9 September 2022 sebagai syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX, atas nama

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat N.I.K. XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelapa Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan Perempuan lain, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pengugat serta selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Pasar Bombah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan Perempuan lain, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pengugat serta selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan Nomor 873.4/1434/BKPSDM/2022, tertanggal 9 September 2022, sehingga dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada posita angka 4;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, dan juga Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan Perempuan lain, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pengugat serta selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun;
4. Bahwa sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 19 September 2023

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 508/Pdt.G/2023/PA.AGM